

RINGKASAN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu sarana pemerintah dalam bidang keterbukaan informasi sebagai salah satu prinsip penting dari *good governance*, yang dapat membantu mewujudkan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah. JDIH terbentuk dengan tujuan sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Meskipun dalam pengelolaan JDIH sudah terdapat standar yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, realitanya masih terdapat beberapa permasalahan, baik secara teknis seperti *server* yang sering down, dan non-teknis, seperti masih terdapat beberapa informasi pada rincian produk hukum yang masih kosong. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan kualitas informasi pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam hal ini pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kualitas informasi pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas informasi *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih belum optimal. Kualitas informasi akan sangat bergantung pada standar yang dimiliki. Pengembangan kualitas informasi perlu dilakukan dengan memperhatikan kualitas informasinya, dalam hal ini memperhatikan standar, baik dalam membalas atau merespon umpan balik kepada publik, standar mengukur kelengkapan informasi yang tersedia pada *website* JDIH Kemendesa, dan format standar yang digunakan dalam penyajian informasi.

Kata Kunci: jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kualitas informasi, pengembangan kualitas informasi, *website*

SUMMARY

The Legal Documentation and Information Network (JDIH) is a government tool for information transparency, a fundamental principle of good governance. It aims to facilitate the government's realization of public service functions. JDIH was established to provide a joint utilization framework for legal documents in an orderly, integrated, and continuous manner. It also serves as a means to provide comprehensive, accurate, easy, and quick legal information services. Despite the existing standards set by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 8 of 2019 on Legal Document and Information Management Standards, there are still several issues in the management of JDIH, both technical, such as servers frequently going down and non-technical, such as the presence of incomplete information in the details of legal products. Therefore, research related to developing information quality on the JDIH website, in this case, at the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, is necessary.

This study aims to examine the development of information quality on the JDIH website of the Ministry of Villages, Disadvantaged Region Development, and Transmigration. The author employs a qualitative approach with purposive sampling techniques in this research. The primary data sources were interviews, observation, and documentation. In contrast, secondary data sources were derived from reports and journals related to Legal Documentation and Information Network discussions. The data analysis method used is the Miles, Huberman, and Saldana (2014) interactive analysis model.

This study concludes that the quality of information on the Documentation and Information Network website of the Ministry of Villages, Disadvantaged Region Development, and Transmigration still needs to be improved. The quality of information heavily depends on the standards set. Improving the quality of information should focus on these standards, specifically in responding to public feedback, measuring the completeness of information available on the JDIH website of Kemendesra, and the standard formats used in presenting information.

Keywords: legal documentation and information network, information quality, information quality development, website